

## TINJAUAN ATAS PERSEPSI SATUAN KERJA TERHADAP RENCANA PENARIKAN DANA PADA SATUAN KERJA DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V

Anindya Enggar Novita<sup>1</sup>, Muhammad Heru Akhmadi<sup>2</sup>  
Politeknik Keuangan Negara STAN; Tangerang Selatan<sup>1,2</sup>  
e-mail: [anindyaen11@gmail.com](mailto:anindyaen11@gmail.com)<sup>1</sup>, [heru.cio@gmail.com](mailto:heru.cio@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pengelolaan kas negara merupakan upaya pemerintah dalam menjaga likuiditas keuangan negara. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan persepsi satuan kerja (SATKER) dan Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) terhadap penyampaian rencana penarikan dana harian. Rencana penarikan dana merupakan bagian dari proses perencanaan kas untuk memastikan besaran dana kas pemerintah yang dicairkan pada waktu-waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi SATKER selaku pengguna anggaran dan Kuasa BUN terhadap penyampaian rencana penarikan dana harian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana data-data yang dikumpulkan dari proses wawancara terhadap SATKER mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V yang menyampaikan RPD Harian pada tahun anggaran 2018—2020. Pengolahan data menggunakan software ATLAS.ti untuk mendapatkan kodifikasi kode sebagai temuan penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa SATKER mengerti dan memahami Rencana Penarikan Dana Harian, baik secara urgensi, tujuan, manfaat, dan proses penyusunan RPD Harian.

**Kata kunci:** Keuangan Negara, Perencanaan Kas, Rencana Penarikan Dana Harian\

### Abstract

*State cash management are government's efforts to maintain state financial liquidity. This study explains about working units and general treasurer of the state (Kuasa BUN) perceptions on Daily Disbursement Plan (daily RPD) conveyment. Daily Disbursement Plan is part of the cash planning process to ensure the amount of government cash funds that are disbursed at certain times. The purpose of this study is to determine the perception of the work unit as budget users and the general treasurer of the state on the submission of daily RPD. This study uses a descriptive qualitative method in which the data collected from the interview process to the working unit partners of treasurer of the state Jakarta V who submitted the Daily RPD in the 2018-2020 budget year. The data processing uses ATLAS.ti software to obtain code codification as research findings. The result of this research shows that working units are understand about daily RPD, whether from urgency, goals, benefit, and creation process aspect of daily RPD.*

**Keywords:** State Finance, Cash Planning, Daily Disbursement Plan

### PENDAHULUAN

Keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu negara dalam membiayai belanjanya menjadi pendorong pemerintah dalam melakukan pengelolaan likuiditas agar sumber daya keuangan yang kurang tersebut dapat teralokasi dengan tepat. Menurut (Sigit, 2019), perencanaan kas pemerintah pusat merupakan hal yang krusial dalam memfasilitasi pencapaian kebijakan fiskal secara tertib dan memastikan bahwa pengeluaran yang dianggarkan dapat dibiayai dengan lancar. Peningkatan kualitas perencanaan kas pemerintah pusat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan optimalisasi *cash management*-nya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana

Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas menjadi kabar baik bagi pengelolaan kas negara yang cukup banyak mengalami hambatan dari pemberlakuan PMK sebelumnya. Hambatan-hambatan yang terjadi antara lain berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Keuangan atas evaluasi pelaksanaan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 kepada satuan kerja didapatkan bahwa 34% responden menginginkan agar Surat Perintah Membayar (SPM) tetap diproses meski tanpa penyampaian RPD Harian terlebih dahulu.

Dikutip dari (Sigit, 2019) bahwa berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) masih terdapat banyak permasalahan, terutama pada tingginya tingkat deviasi RPD Harian di SATKER-SATKER pemerintah. Selain permasalahan deviasi yang tinggi, menurut Widodo (2019) penyusunan RPD Harian oleh SATKER K/L belum berjalan dengan baik karena masih banyak pengajuan dispensasi RPD Harian oleh SATKER atas SPM transaksi besar. Suprijanto (dalam Sumantri, 2017) mengemukakan bahwa KPPN Jakarta V merupakan KPPN yang memiliki beban kerja terbesar apabila dibandingkan dengan KPPN lainnya di Jakarta. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian di KPPN Jakarta V melalui pratinjau pada jurnal-jurnal dan artikel yang dilakukan. Menurut (Sumantri, 2017) pengajuan pembayaran tagihan oleh satuan kerja K/L dalam wilayah kerja KPPN Jakarta V masih sering mengalami permasalahan ketika dana akan dicairkan.

Penyampaian RPD Harian yang tidak tepat dapat berupa nilai SPM yang tidak sesuai dengan RPD Harian dan SPM disampaikan mendahului tanggal jatuh tempo RPD Harian sehingga menyebabkan KPPN menolak SPM kategori transaksi besar yang diajukan oleh SATKER. Adanya deviasi yang tinggi pada RPD Harian dapat menimbulkan tidak optimalnya penggunaan kas sehingga muncul kas mengganggu (*idle cash*). Semakin tinggi terjadinya deviasi pada RPD Harian di suatu SATKER K/L menjadi penanda bahwa perencanaan kas tidak berjalan dengan efektif. Permasalahan-permasalahan perencanaan kas sebagaimana dijelaskan di atas mendesak pengelola kas (*cash manager*) untuk melakukan optimalisasi *idle cash*. Jumlah *idle cash* yang berjumlah besar dapat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip manajemen kas pemerintah yang baik. Dengan *idle cash* yang tinggi dapat menyebabkan ketidakefisienan interest atas biaya pinjaman dari perolehan kas tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam mewujudkan pengelolaan yang efektif terkait perencanaan kas.

Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai perencanaan kas pemerintah pusat yang dilakukan terdahulu banyak penulis yang tidak memisahkan secara jelas mengenai jenis RPD yang digunakan dalam penelitian baik yang bersumber dari RPD bulanan dan/atau RPD Harian. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan pembaca dalam memahaminya sehingga perlu penelitian lebih lanjut diharapkan dapat lebih jelas dalam memisahkan kedua hal yang berbeda tersebut. Selain itu, belum dilakukannya penelitian mengenai persepsi SATKER dan kuasa BUN dalam melihat keberadaan rencana penarikan dana harian juga menjadi latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian ini.

Persepsi untuk menemukan tingkat kesadaran dan pemahaman SATKER merupakan hal yang sangat penting. Menurut (Winardi, 2015), persepsi mampu mempengaruhi perilaku seseorang dalam membangun sikap. Ia juga menambahkan bahwa persepsi merupakan rangkaian aktivasi untuk menerima stimuli kemudian mengorganisasinya dan mengalihbahasakan stimuli tersebut. Rangkaian aktivasi tersebut menyebabkan persepsi mampu mempengaruhi perilaku dan membangun sikap seseorang. Di samping itu (Sarwono, 2009) mengungkapkan perbedaan persepsi antarkelompok

manusia salah satunya disebabkan adanya faktor kebutuhan atau need sehingga perbedaan persepsi atas faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku antarkelompok dan berkemungkinan dalam mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu atas adanya perbedaan persepsi.

Menurut (Shaleh,2009), tujuan dapat diarahkan melalui minat seseorang dalam melakukan perbuatan tertentu. Perlakuan tersebut diakibatkan oleh dorongan dan motif manusia. Crow & Crow (dalam Abror, 1993) menyatakan bahwa interest seseorang dalam melakukan suatu hal dapat berhubungan dengan daya gerak yang menyebabkan terdorongnya seseorang pada suatu benda, kegiatan maupun pengalaman yang afektif dari kegiatan tersebut. Adapun Crow & Crow (dalam Shaleh, 2004) berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya minat ialah dorongan dari dalam individu itu sendiri. Oleh sebab itu, seseorang yang tertarik minatnya akan mendorongnya untuk melakukan kegiatan lebih baik dan giat.

Dalam suatu pemerintahan dikenal dengan adanya kementerian teknis dan kementerian yang menangani hal administratif keuangan. Kementerian Keuangan sebagai kendali untuk menjalankan kewenangannya selaku bendahara umum negara memerlukan hal-hal bersifat administratif seperti RPD Harian, SPM fisik, laporan pertanggungjawaban bendahara, revisi DIPA, langkah-langkah akhir tahun, dan lain-lain untuk melangsungkan tugas dan fungsinya. Hal tersebut berbeda dengan orientasi kementerian teknis selaku pengguna anggaran yang beranggapan bahwa semakin banyak hal-hal administratif dalam penyampaian SPM maka akan semakin lama dana dapat dicairkan untuk kemudian direalisasikan. Hal-hal administratif tersebut salah satunya ialah penyampaian RPD Harian.

Opini mengenai pemangkasan hal-hal yang bersifat administratif dalam pemerintahan sebenarnya telah menjadi perhatian dalam tahun-tahun belakangan ini. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa perlu dilakukan pemangkasan birokrasi sehingga hal-hal yang bersifat administratif tidak menjadi penghalang dalam melakukan reformasi birokrasi. Kementerian selaku pengguna anggaran memiliki kecenderungan dalam menganggap RPD Harian sekadar persyaratan administratif agar dana transaksi besar dapat dicairkan. Menurut BUN, RPD sangat diperlukan untuk BUN dapat mempersiapkan dana atas pengajuan SPM dengan kategori transaksi besar.

Apabila SATKER menganggap bahwa RPD Harian merupakan hal rigid yang perlu untuk dihapuskan maka hal ini mengindikasikan bahwa kementerian teknis belum memahami proses bisnis dari sisi BUN atas tujuan dari disampaikannya RPD Harian minimal 5 (lima) hari sebelum SPM transaksi besar diajukan ke KPPN. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menyinggung mengenai tujuan penyusunan RPD dari sisi BUN selaku cash manager sedangkan dari sisi SATKER K/L sebagai pengguna anggaran (PA) belum pernah ditemukan pembahasan mengenai indikator persepsi atas makna, tujuan, dan kepentingan RPD Harian untuk mengukur tingkat kesadaran dan pemahaman SATKER mengenai pembuatan dan penyampaian RPD Harian. Dengan melihat fenomena permasalahan RPD Harian yang tidak kunjung selesai menyebabkan munculnya pertanyaan mengenai tingkat pemahaman dan/atau tingkat kesadaran SATKER terhadap kewajiban penyampaian RPD Harian. Hal tersebut melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian mengenai indikator persepsi SATKER terhadap RPD Harian.

Penulis memfokuskan penelitian untuk melakukan penelusuran berpendekatan studi kasus tentang indikator persepsi SATKER-SATKER K/L yang memiliki daya serap anggaran rendah di wilayah kerja KPPN Jakarta V mengenai RPD Harian dan mengukur indikator kinerja rencana kas SATKER mitra KPPN Jakarta V dalam menyampaikan

RPD Harian. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan perumusan masalah mengenai bagaimana indikator persepsi SATKER wilayah kerja KPPN Jakarta V yang memiliki daya serap anggaran rendah terhadap rencana penarikan dana Harian. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengukur persepsi SATKER mitra KPPN Jakarta V yang memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah terhadap Rencana Kas (RPD Harian) ditinjau dari indikator persepsi tersebut serta menganalisis kinerja perencanaan kas SATKER mitra KPPN Jakarta V.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti mengolahnya menggunakan 2 (alat) antara lain aplikasi ATLAS.ti yang membantu labeling/coding hasil transkrip wawancara, mengorganisasi code yang dibentuk dari kegiatan coding sehingga dapat dianalisis secara efisien dan terstruktur. ATLAS.ti merupakan aplikasi yang memiliki program CAQDAS (*computer-aided qualitative data analysis software*) sebagai gabungan pemetaan yang berfungsi mengorganisasi, memberi label sebagai kode, dan menganalisis data berupa transkrip wawancara secara efisien dan terstruktur.

Menurut Afriansyah (dalam Bayu, 2020), ATLAS.ti dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan karya tulis yang diperoleh dari network knowledge yang dibentuk sehingga mampu menjelaskan keterkaitan antarkonsep yang diperoleh dari aplikasi ATLAS.ti. Selanjutnya, dalam menjawab rumusan masalah pertama, penulis melakukan analisis diskriptif pada hasil data dokumentasi dalam pendekatannya. Penelitian menggunakan aplikasi ATLAS.ti karena menurut Drijvers (dalam Afriansyah, 2016), perangkat lunak ini memiliki 4 (empat) keunggulan antara lain: ATLAS.ti mampu membaca berbagai macam jenis data, ATLAS.ti memiliki panduan yang mudah dijangkau karena tersedia pada internet, ATLAS.ti merupakan aplikasi yang populer di kalangan peneliti yang mengolah data kualitatif, serta harganya terjangkau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Persepsi KPPN Jakarta V terhadap RPD Harian**

Penyusunan RPD Harian dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) SATKER dan ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) SATKER. PPK merupakan pejabat perbendaharaan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan SATKER karena tugasnya yang merepresentasi sebagian kewenangan dan tugas kuasa pengguna anggaran SATKER. Secara umum, KPA mendelegasikan kewenangannya terkait penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pelaksanaan kontrak secara kontraktual maupun swakelola, pengujian dan penandatanganan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP). Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan PPK dalam penyusunan RPD Harian antara lain:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) serta Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- b. Rencana pelaksanaan kegiatan dan dana yang akan dikeluarkan berdasarkan perencanaan yang telah disusun dalam RPD Bulanan.

Rencana pelaksanaan kegiatan merupakan daftar yang berisi uraian indikator kinerja kegiatan, output, komponen, sub komponen, akun, jadwal pelaksanaan kegiatan, serta pagu kegiatan tersebut. Dokumen ini disusun secara tahunan atas identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan baik untuk kegiatan yang bersifat kontraktual maupun non

kontraktual. Kegiatan non kontraktual ini dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan antara lain kegiatan rutin/operasional dan swakelola.

Dalam hal suatu SATKER memiliki lebih dari 1 (satu) PPK, KPA perlu menunjuk salah satu PPK sebagai koordinator untuk mengkompilasi RPD Harian dari kegiatan PPK lain. Setelah dikompilasi, koordinator PPK menyerahkan RPD Harian kompilasi kepada KPA untuk selanjutnya PPSPM merekap RPD Harian dan membandingkannya pada ketersediaan pagu. Secara umum, penyusunan RPD Harian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kalender kegiatan Harian;
- b. Penyesuaian kalender kegiatan dengan pengajuan SPM;
- c. Penyusunan RPD Harian; kemudian
- d. Penyampaian RPD Harian dari PPK kepada KPA.

KPPN Jakarta V menjelaskan bahwa KPPN sampai dengan saat ini hanya menerima RPD Harian dengan jenis SPM tipe C. SPM Tipe C merupakan SPM kategori transaksi besar dengan nominal 1 (satu) miliar sampai dengan 500 (lima ratus) miliar rupiah. Dengan SPM tipe tersebut, RPD Harian wajib disampaikan SATKER paling lambat 5 hari kerja (HK) sebelum penyampaian SPM. KPPN Jakarta V selaku BUN melakukan pemrosesan SPM melalui aplikasi konversi paling lambat 5 HK sebelum disampaiakannya SPM.

Secara prinsip, KPPN Jakarta V memroses SPM menjadi SP2D maksimal 1 HK setelah dipenuhinya persyaratan SPM. Namun, pada tahun 2021 terdapat kebijakan baru dari KPPN setelah adanya relaksasi RPD Harian bahwa SATKER wajib menyampaikan kembali RPD Harian kepada KPPN dengan format yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Format tersebut ialah SPM transaksi besar yang memerlukan penyampaian RPD Harian hanya untuk SPM di atas atau sama dengan 5 (lima) miliar rupiah dari yang sebelumnya 1 (satu) miliar rupiah. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengeluaran SATKER merealisasikan belanjanya.

Seperti yang diketahui bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya laju perekonomian dan berdampak pula pada proses pengadaan barang/jasa dalam birokrasi pemerintahan sehingga realisasi belanja satuan kerja terhambat. Hal ini menjadi fokus pemerintah terutama Ditjen Perbendaharaan. Menurut laman [djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id) disebutkan bahwa kewajiban penyampaian RPD Harian seringkali menjadi kendala administratif selama proses pencairan dana. Hal tersebut menyebabkan proses realisasi belanja tertunda karena penolakan SPM oleh KPPN akibat SPM disampaikan tidak sesuai dengan perkiraan tanggal pada RPD Harian. Karenanya, SATKER melakukan penyampaian RPD Harian kembali dan SPM disampaikan lagi setelah 5 (lima) hari berikutnya.

Atas dasar tersebut, Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-682/PB/2020 pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran dan kembali didukung oleh Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-1039/PB.3/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebagai penegasan SPM tanpa RPD Harian. Peraturan tersebut menjadi dasar adanya kebijakan relaksasi RPD Harian sehingga SATKER tidak lagi wajib menyampaikan RPD Harian pada SPM kategori transaksi besar.

Menurut Kepala MSKI KPPN Jakarta V, relaksasi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pencairan dana pada SATKER-SATKER mitranya. Menurutnya, adanya relaksasi RPD Harian otomatis akan menyulitkan BUN dalam melakukan perencanaan kasnya karena BUN tidak memiliki alat perkiraan kas yang perlu

disiapkan. BUN perlu memperkirakan secara mandiri dan mempersiapkan dana yang cukup dalam menjamin seluruh tagihan secara tepat waktu dan jumlah. Adanya kebijakan relaksasi menyebabkan penurunan akurasi perencanaan kas di KPPN Jakarta V.

Akurasi RPD Harian pada KPPN Jakarta V semakin memburuk tiap tahunnya. Hal ini tercermin pada nilai akurasi RPD Harian KPPN Jakarta V mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata deviasi RPD Harian seluruh SATKER di KPPN mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020. Tingkat deviasi ini diperoleh berdasarkan ketidaksesuaian nominal pada dokumen rencana penarikan dana harian SATKER dengan nominal pada SPM kategori transaksi besar yang disampaikan SATKER.

Menurut KPPN Jakarta V, adanya relaksasi ini otomatis menyulitkan BUN dalam melakukan perencanaan kas walaupun tidak secara signifikan. Meskipun relaksasi menyulitkan BUN dalam perencanaan kas, menurut KPPN Jakarta V tujuan perencanaan kas sementara dikesampingkan untuk tujuan yang lebih mendesak berupa percepatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui kemudahan pencairan dana tanpa RPD Harian.

Meskipun terdapat kebijakan *extraordinary* tersebut, aplikasi OMSPAN belum melakukan penyesuaian sehingga laporan deviasi SATKER tetap dihitung apa adanya bahwa SATKER tidak menyampaikan rencana penarikan dana harian yang menyebabkan meningkatnya tingkat deviasi SATKER pada tahun 2020. Akumulasi dari tingkat deviasi SATKER tersebut pada akhirnya mempengaruhi nilai akurasi RPD Harian tingkat KPPN Jakarta V yang menjadi menurun.

KPPN Jakarta V menjelaskan bahwa RPD Harian sebelum disampaikan ke KPPN Jakarta V perlu disusun SATKER mitranya melalui aplikasi SAS untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN Jakarta V melalui e-mail. Aplikasi SAS merupakan Sistem Aplikasi Satker yang berbasis desktop guna mengelola berbagai tugas kerja baik untuk pengelolaan data kontrak, RPD Harian, surat perintah membayar, laporan pertanggungjawaban bendahara bagi Satker dan sebagainya. Menurut kepala KPPN Jakarta V, RPD Harian perlu disampaikan SATKER sebelum penyampaian SPM kategori besar untuk BUN dapat memiliki cukup waktu mengetahui informasi kas yang harus dikelolanya. Pengelolaan kas tersebut dilakukan dengan melakukan investasi jangka pendek apabila terjadi kelebihan kas dan berupaya mencari kas ketika kekurangan kas. Hal tersebut merupakan urgensi adanya RPD Harian menurut kuasa bendahara umum negara khususnya pada KPPN Jakarta V.

Berkaitan dengan urgensi yang disampaikan, tujuan RPD Harian menurut KPPN Jakarta V selaku Kuasa BUN yaitu untuk menghindari adanya *idle cash* yang merupakan bentuk ketidakefektifan pemanfaatan kas pada bendahara umum negara. *Idle cash* merupakan sejumlah uang yang tidak dimanfaatkan padahal apabila dimanfaatkan dapat menghasilkan keuntungan berupa *yield*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan adanya RPD Harian KBUN dapat mengetahui tindakan yang perlu dilakukan atas adanya informasi kebutuhan kas pada hari-hari tertentu baik ketika terjadi kekurangan kas maupun kelebihan kas.

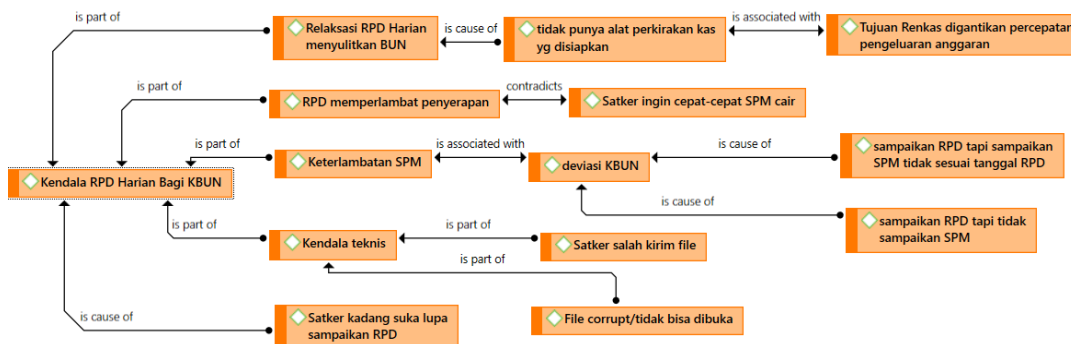
Sebagaimana diketahui bahwa pemberian dispensasi RPD Harian merupakan hal yang perlu dilakukan KPPN secara selektif sehingga termasuk dalam penilaian kinerja pada aplikasi OMSPAN. Pengajuan permohonan dispensasi dapat disetujui KPPN dengan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Dispensasi SPM Tanpa RPD Harian untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang penting maupun mendesak. Oleh karenanya, perlu penilaian secara selektif dan edukatif dengan mempertimbangkan kondisi kas BUN.

Menurut Kepala Seksi MSKI KPPN Jakarta V, pengajuan permohonan dispensasi oleh SATKER kepada KPPN merupakan hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Hal ini dikarenakan SATKER memiliki cukup waktu dalam memperkirakan waktu penyampaian SPM untuk mencairkan dana. Hal ini karena perkiraan waktu pencairan dapat diketahui SATKER berdasarkan perencanaan per-termin yang telah dibuat SATKER.

Kesulitan tidak ditemui dalam penyusunan maupun pemrosesan RPD Harian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh KBUN KPPN Jakarta V, penyusunan oleh SATKER seharusnya tidak mengalami kesulitan. Hal ini karena SATKER diperbolehkan menyampaikan RPD Harian sebelum 5 HK sebelum sampaikan SPM, SATKER dapat melakukan penyampaian lebih dari 5 HK seperti 6, 7, 8 HK dan seterusnya sebelum penyampaian SPM. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi MSKI KPPN Jakarta V sebagai berikut:

KPPN Jakarta V menganggap bahwa pemrosesan RPD Harian oleh KPPN Jakarta V tidak mengalami kesulitan karena telah menggunakan aplikasi Konversi serta SATKER dapat melakukan pergeseran RPD Harian SATKER maksimal H+4 HK dari tanggal RPD Harian dalam hal antrian SATKER menyebabkan SPM diterima melebihi waktu layanan sehingga SP2D tertanggal keesokan harinya, gagal sistem aplikasi elektronik sehingga SPM tidak bisa diproses, serta karena adanya pemadaman listrik sehingga SPM tidak bisa diterima dan diproses KPPN Jakarta V. Sementara, pergeseran RPD Harian dapat dilakukan juga apabila merupakan pengajuan kembali atas SPM yang pernah dikembalikan KPPN Jakarta V, konfirmasi SATKER dari pengajuan SPM melewati RPD Harian awal, serta hal lainnya.

Meskipun tidak ada kesulitan dalam penyusunan dan pemrosesan RPD Harian bagi KBUN, namun terdapat kendala-kendala yang terjadi pada KPPN Jakarta V terkait RPD Harian. Kendala tersebut antara lain dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Pengolahan Data ATLAS.ti terkait Kendala RPD Harian bagi KBUN  
 Sumber : Data Diolah, 2021

Menurut Muthohar (dalam Rizaldi, 2018), efektivitas proyeksi belanja SATKER dinilai dari kemampuan SATKER menghasilkan output proyeksi belanja sesuai untuk manajemen kas pemerintah yang optimal. Optimalisasi dalam manajemen kas diperoleh apabila proyeksi belanja SATKER dapat disampaikan tepat waktu dan akurat. Dalam konstruk persepsi atas efektivitas proyeksi belanja dibangun oleh dua indikator yaitu ketepatan waktu penyampaian proyeksi dan akurasi proyeksi belanja. Indikator-indikator tersebut memiliki hubungan yang bersifat formatif/berbanding lurus.

Adanya keterlambatan penyampaian SPM yang dilakukan oleh SATKER menyebabkan tidak sesuai tanggal yang tertera pada RPD Harian sehingga deviasi

RPD Harian pada kuasa BUN meningkat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi KPPN Jakarta V. Selain itu, deviasi dapat terjadi akibat SATKER telah menyampaikan RPD Harian namun SPM tidak disampaikan atau SPM tidak sesuai tanggal perkiraan penarikan dana. Hal tersebut dapat menyebabkan deviasi RPD Harian sebesar 100% pada KPPN Jakarta V.

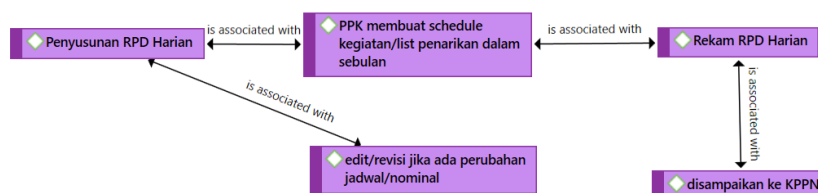
Kendala selanjutnya ialah SATKER terkadang sering melupakan penyampaian RPD Harian dan menginginkan untuk SPM cepat dicairkan. Hal tersebut mendasari persepsi KPPN Jakarta V selaku KBUN bahwa RPD Harian memperlambat penyerapan anggaran SATKER meskipun tidak secara signifikan karena hanya berpengaruh beberapa hari saja. Selain itu, KPPN Jakarta V sering mengalami kendala teknis berupa SATKER yang salah mengirimkan file ADK RPD Harian ataupun SATKER mengirimkan file ADK yang tidak dapat dibuka (corrupt) sehingga menyebabkan KPPN perlu melakukan permintaan pengiriman ulang kepada SATKER dan otomatis memperlambat proses penyampaian RPD Harian.

Atas kendala-kendala tersebut dan didukung oleh kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara melalui KPPN mengeluarkan kebijakan baru tahun 2021 untuk mempermudah SATKER melakukan pencairan dana melalui penyampaian SPM tanpa RPD Harian. Meskipun SPM tanpa didahului RPD Harian, SPM akan tetap diproses KPPN Jakarta V untuk menjadi SP2D namun tanggal SP2D akan dimundurkan 3—4 hari dari penyampaian SPM. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu BUN menyiapkan dananya yang sebelumnya merupakan tugas dari RPD Harian.

## Tinjauan Persepsi SATKER terhadap RPD Harian

SATKER mitra KPPN Jakarta V mendeskripsikan dalam beberapa definisi mengenai RPD Harian, antara lain RPD Harian merupakan rencana yang didasarkan perencanaan satu tahun. Rencana tersebut dirinci per-detail bulan dari kegiatan yang direncanakan dan diajukan kepada KPPN seminggu sebelum pengajuan SPM kategori transaksi besar. Adapun tanggung jawab penyusunan RPD Harian dilakukan oleh staf pengelola PPK SATKER.

Sementara itu, RPD Harian juga diartikan sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk mengukur dan mengetahui dana penyerapan anggaran SATKER-SATKER sehingga Kemenkeu dapat menyiapkan ketersediaan uang pada hari tersebut. RPD Harian juga merupakan dokumen perencanaan yang perekamannya dilakukan di Aplikasi SAS dan dikirimkan ke KPPN dengan mengupload-nya melalui aplikasi Sprint.



Gambar 2. Hasil Pengolahan Data ATLAS.ti terkait Penyusunan RPD Harian

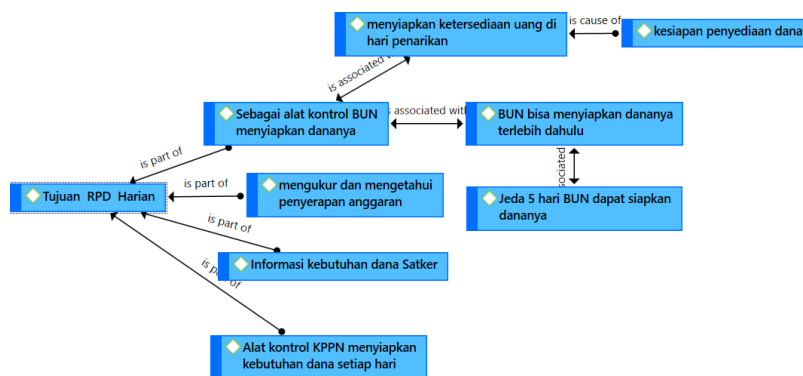
Sumber : Data Diolah, 2021

Menurut hasil pengolahan data pada aplikasi ATLAS.ti dan diolah dalam network-nya sebagaimana pada gambar di atas, penyusunan RPD Harian dilakukan oleh PPK dengan membuat schedule yang berisi kegiatan dan daftar penarikan dalam satu bulan untuk selanjutnya melakukan perekaman RPD Harian dalam aplikasi SAS per-PPK dan



disampaikan ke KPPN. Dalam melakukan proses tersebut, tidak menutup kemungkinan dilakukan edit/revisi RPD Harian ketika terjadi perubahan jadwal penyampaian SPM maupun nominal. Hal ini telah sesuai peraturan sebagaimana pada PMK Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Menurut teori yang diungkapkan Sarwono (2009), suatu perilaku yang dihasilkan tidak terlepas dari persepsi kelompok/individu tersebut. Adapun persepsi salah satunya disebabkan atas adanya faktor kebutuhan/*need* sehingga perbedaan persepsi atas faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku yang besar kemungkinan mempengaruhi tercapainya tujuan kelompok/individu tersebut. Oleh karena itu, untuk mengukur persepsi SATKER terhadap RPD Harian, dilakukan pengolahan data mengenai tujuan RPD Harian bagi SATKER mitra KPPN Jakarta V.



Gambar 3. Hasil Pengolahan Data ATLAS.ti terkait Tujuan RPD Harian  
 Sumber : Data Diolah, 2021

Menurut keterangan SATKER, adanya RPD Harian memiliki tujuan untuk mengukur dan mengetahui penyerapan anggaran karena karena proses penyusunan RPD Harian tak lepas dari proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh SATKER sehingga SATKER memerlukan catatan pencairan tiap termin untuk SPM kategori transaksi besar. Selain itu, yang paling ditekankan SATKER sehingga sering diulang dalam wawancara ialah RPD Harian bertujuan sebagai alat kontrol bagi BUN menyiapkan dana dan memastikan bahwa terdapat ketersediaan dana pada hari penarikan. Tujuan RPD lainnya adalah untuk BUN dapat mengetahui informasi kebutuhan dana SATKER yang kemudian akan berguna bagi BUN dalam melakukan investasi maupun divestasi. RPD Harian dinilai SATKER juga bertujuan sebagai alat kontrol KPPN dalam menyiapkan kebutuhan setiap harinya.

Bagi SATKER, RPD Harian disusun sebagai bentuk support SATKER kepada KPPN dalam menyiapkan dana pada hari-hari selanjutnya. Menurutnya, penyusunan dan penyampaian RPD Harian perlu dilakukan dengan sebaik mungkin mengikuti aturan syarat administratif pencairan dana yang ada. Hal tersebut dilatarbelakangi agar proses pencairan dana yang dilakukan SATKER tidak terhambat melalui penolakan SPM kategori transaksi besar akibat tidak menyampaikan RPD Harian. Menurut SATKER yang menghasilkan dan melakukan belanja atas PNPB yang dihasilkan, RPD Harian sangat bermanfaat bagi SATKER jenis tersebut. Sama halnya seperti Kementerian Keuangan selaku BUN, SATKER PNPB perlu RPD Harian guna melihat ketersediaan dan kesiapan dana pada SATKER tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada cuplikan wawancara berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara terkait Urgensi RPD Harian SATKER

Partisipan	Cuplikan Dialog	Komentar/terjemah
III	“... kami SATKER yang APBN-nya bersumber dari RM dan PNBPN dan sebagian besar kami dibiayai dari PNBPN atau mandiri sesuai MP (maksimal pencairan) sehingga pencairan tetap melihat ketersediaan dana dari MP tersebut (jadi hampir sama dengan BUN) kalau dilihat dari urgensinya.”	

Sumber : Data Diolah, 2021

Sementara itu, umumnya pada SATKER biasa, RPD Harian diperlukan sebagai kontrol kegiatan di periode berikutnya guna menunjang percepatan pemrosesan pencairan dana pada KPPN. Dengan adanya RPD Harian, SP2D akan lebih cepat dikeluarkan sekitar 1—2 hari sedangkan apabila tanpa menggunakan RPD Harian dana cair lebih lambat sekitar 3—4 hari. Menurut salah satu SATKER, sebenarnya tanpa melalui RPD Harian merupakan hal yang bagus karena dapat mempercepat jalur administrasi dalam proses pencairan dana. SATKER juga memahami bahwa tujuan RPD Harian adalah sebagai alat kontrol BUN mempersiapkan dananya terlebih dahulu selain sebagai kontrol SATKER dalam pelaksanaan kegiatan di periode-periode berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara seluruh partisipan SATKER sebagaimana dirangkum dalam lampiran 2, disebutkan bahwa urgensi dari adanya RPD Harian ialah untuk mengukur dan mengetahui penyerapan anggaran serta untuk menyiapkan ketersediaan uang pada hari penarikan. Hal tersebut guna memastikan kesiapan penyediaan dana baik pada KPPN maupun SATKER PNBPN.

Seluruh SATKER mitra KPPN Jakarta V menganggap bahwa permohonan dispensasi merupakan hal yang wajar dilakukan SATKER. Menanggapi hal tersebut, padahal KPPN Jakarta V dituntut untuk selektif dalam melakukan persetujuan permohonan dispensasi SPM tanpa RPD Harian. Apabila SATKER memiliki persepsi yang mewajarkan adanya dispensasi RPD Harian maka hal ini dapat menjadi potensi kendala BUN dalam melakukan perencanaan kas. Berdasarkan kinerja pemberian dispensasi RPD Harian yang dilakukan KPPN Jakarta V selama 3 (tiga) tahun ke belakang ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Pemberian Dispensasi RPD Harian KPPN Jakarta V

Tahun	Jumlah SPM menggunakan RPD	Jumlah Dispensasi	Nilai pemberian dispensasi RPD Harian KPPN Jakarta V
2018	4.643	112	97,59
2019	4.939	68	98,62
2020	2.571	166	93,54

Sumber : Data Diolah, 2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa KPPN Jakarta V mengalami penurunan selektivitas pemberian dispensasi kepada SATKER atas SPM yang disampaikan. tahun 2020 KPPN Jakarta V mengalami penurunan nilai dispensasi RPD Harian dari 98,62 menjadi 93,54 padahal jumlah SPM kategori transaksi besar mengalami penurunan yang jauh dari 4.939 SPM menjadi 2.571 SPM. Jumlah tersebut diiringi dengan pemberian dispensasi oleh KPPN Jakarta V kepada mitra SATKER-nya yang meningkat dari 68 menjadi 166.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi MSKI KPPN Jakarta V pemberian dispensasi dilakukan guna memudahkan SATKER melakukan pencairan pagunya untuk kegiatan pada masa awal pandemi Covid-19 sebelum bulan September tahun 2020. Pertengahan bulan Agustus menjadi batas bahwa RPD Harian sudah tidak lagi diwajibkan pada penyampaian SPM kategori besar tahun 2020 oleh Ditjen Perbendaharaan Negara guna meningkatkan realisasi DIPA SATKER-SATKER di Indonesia.

Adapun dari sisi SATKER, alasan atas adanya persepsi SATKER bahwa permohonan dispensasi SPM tanpa RPD Harian merupakan hal yang wajar dilakukan SATKER tergambar dalam hasil network wawancara berikut:



Gambar 4. Hasil Pengolahan Data ATLAS.ti terkait Kewajaran Permohonan Dispensasi RPD Harian

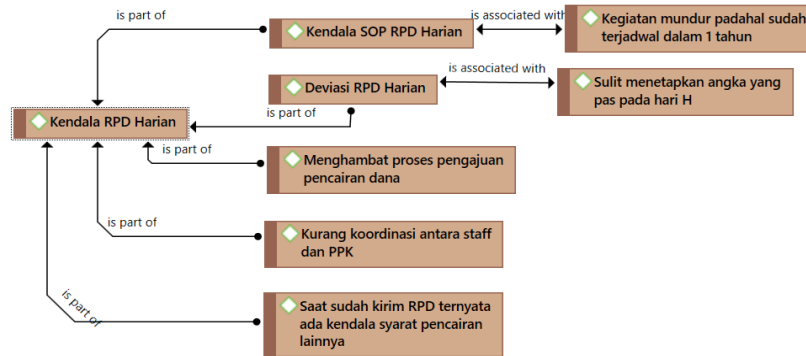
Sumber : Data Diolah, 2021

Permohonan dispensasi SPM tanpa RPD Harian menjadi wajar dilakukan SATKER antara lain karena RPD Harian merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya masih dalam prakiraan. Prakiraan yang dimaksud ialah nominal yang tertera pada RPD Harian bukan merupakan angka realisasi. Angka realisasi hanya diwujudkan atas SPM yang disampaikan SATKER kepada KPPN Jakarta V. Selain itu, SATKER berpendapat bahwa permohonan dispensasi wajar dilakukan untuk belanja modal dan barang karena sifatnya yang mendadak bukan rutin sebagaimana belanja pegawai yang diajukan RPD Hariannya rutin setiap bulan. Sifat SPM yang mendadak menyebabkan RPD Harian terkadang lupa disampaikan oleh SATKER akibat SATKER sudah mengalami kesulitan menghitung pajak dan berkas persyaratan lain untuk melampiri SPM belanja modal dan barang. Hal tersebut diakui SATKER sebagai kesalahan human error yang terkadang bisa terjadi pada SATKER-SATKER pada umumnya.

SATKER mitra KPPN Jakarta V secara umum menyatakan bahwa tidak merasa kesulitan atas adanya RPD Harian. Hal ini antara lain karena Bagi SATKER, penyusunan RPD Harian tidak sulit dilakukan antara lain karena perekamannya yang mudah dengan menggunakan Aplikasi SAS. RPD Harian disusun SATKER juga hanya untuk SPM transaksi besar sehingga bukan menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi setiap penyampaian SPM. Sebagian SATKER di bawah KPPN Jakarta V mengaku bahwa pagu SATKER yang kecil menyebabkan RPD Harian jarang untuk dibuat karena SPM transaksi besar jarang dilakukan pada pagu SATKER yang tergolong kecil. Selain itu, penyampaian RPD Harian diakui SATKER tidak memberatkan karena pengirimannya dapat dilakukan SATKER melalui aplikasi eSPM.

Meskipun SATKER merasa tidak mengalami kesulitan baik dalam penyusunan dan penyampaian. Namun, terdapat kendala-kendala yang dialami SATKER mitra KPPN Jakarta V. Kendala tersebut antara lain dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 5. Hasil Pengolahan Data ATLAS.ti terkait Kendala RPD Harian



Sumber : Data Diolah, 2021

Kendala tersebut antara lain pada prosedur penyampaian RPD Harian dirasakan SATKER dapat menghambat proses pengajuan SPM. Berdasarkan cuplikan dialog sebagaimana di bawah ini, SATKER mengaku bahwa kendala ada pada jalur penyampaian RPD Harian sehingga menghambat SATKER dalam melakukan pencairan dana.

Tabel 3. Hasil Wawancara terkait Kendala RPD Harian SATKER

Partisipan	Cuplikan Dialog	Komentar/terjemah
II	“Kendalanya di SOP-nya. Kita telat, mengajukan permohonan kan. Lalu dari permohonan kan belum tentu langsung dibikin surat balasannya, minimal kan ada berapa hari lagi, dua hari atau satu hari lagi. Tambah lagi kalau kontraktual kita udah lewat, nanti ditolak lagi. Bikin lagi permohonan. Kendalanya di jalurnya.”	Kendala pada jalur penyampaian RPD Harian sehingga menghambat SATKER mencairkan dana.

Sumber : Data Diolah, 2021

Hambatan tersebut ada pada jeda waktu yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan RPD Harian dan pemrosesan syarat administrasi lainnya seperti kontraktual yang terlewat sehingga memerlukan pengurusan adendum kontrak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama sebelum mengajukan SPM. Selain kasus untuk SPM kontraktual, kendala RPD Harian juga dialami untuk SPM belanja pegawai di mana ketika SATKER sudah mengirimkan RPD Harian ke KPPN untuk SPM belanja pegawai terjadi gagal rekonsiliasi gaji dan tunjangan sehingga SATKER mitra KPPN Jakarta V lupa merekam dan mengirimkan RPD Harian kembali. Menurut pengakuan SATKER, kendala juga tersebut terjadi dalam internal SATKER berupa kurangnya koordinasi antara *staff* pengelola PPK dengan PPK.

Tabel 4. Hasil Wawancara terkait Kendala RPD Harian SATKER

Partisipan	Cuplikan Dialog	Komentar/terjemah
I	“Kalau di kasus SATKER saya kurang apay a, antara perencanaan sama pelaksanaannya itu kurang koordinasi ya, kurang koordinasi rutin dan para PPK-nya juga kurang menyemangati agas cepat realisasinya, cepat dilaksanakan kegiatannya.”	Kendala terjadi pada internal SATKER berupa kurang koordinasi antara <i>staff</i> pengelola PPK dan PPK.

	“Jadi kadang-kadang lupa sih Mbak. Kan kadang-kadang ga mesti saya, misalnya <i>staff</i> yang ngerjain gitu. Kadang di luar ini apasih, kadang kurang koordinasi aja sih Mbak. Padahal itu kerja rutin tapi karena sebulan sekali, mereka suka lupa gitu RENKAS-nya jadi terlambat lah gitu. Mepet ya istilahnya ya, mepet.”	
--	---	--

Sumber : Data Diolah, 2021

## KESIMPULAN

Kinerja rencana kas SATKER wilayah kerja KPPN Jakarta V selama tiga tahun terakhir dalam tingkat akurasi RPD Harian seluruh SATKER menunjukkan kinerja yang cukup buruk karena mengalami penurunan signifikan selama tiga tahun berturut-turut dari 2018—2019. Berdasarkan kinerja Rencana Kas (RENKAS) ditinjau pada tingkat kepatuhan pengiriman RPD Harian, KPPN Jakarta V mengalami kinerja yang membaik selama 2018—2020. Hal ini karena nilai ketepatan waktu seluruh SATKER mitranya meningkat selama tiga tahun tersebut akibat persentase keterlambatan penyampaian RPD Harian terus mengalami penurunan dalam tahun-tahun tersebut.

Penilaian kinerja RENKAS dalam dimensi jumlah pemberian dispensasi RPD Harian KPPN Jakarta V memiliki simpulan bahwa KPPN telah semakin selektif dan edukatif dalam pemberian persetujuan dispensasi RPD Harian SATKER karena pada tahun 2019 telah mengalami penurunan pemberian dispensasi, meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai pemberian dispensasi RPD Harian akibat kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan-kegiatan mendesak perlu segera direalisasikan.

Dalam menjawab indikator persepsi SATKER wilayah kerja KPPN Jakarta V yang memiliki daya serap anggaran rendah terhadap rencana penarikan dana Harian, didapatkan simpulan bahwa berdasarkan tingkat pengetahuan SATKER dianggap mampu dalam menjelaskan pengertian, tujuan, dan proses penyusunan RPD Harian. Dalam hal urgensi RPD Harian terhadap SATKER-nya, SATKER PNBPN merasa bahwa RPD Harian bermanfaat untuk melihat ketersediaan dan kesiapan dana di Sarkernya. Selanjutnya, RPD Harian juga bermanfaat sebagai alat kontrol kegiatan pada periode selanjutnya. Terdapat SATKER mitra KPPN Jakarta V yang beranggapan bahwa RPD Harian disusun sebagai bentuk support kepada KPPN Jakarta V untuk menyiapkan dananya dan sebagai bentuk mengikuti aturan administratif agar dana segera dapat dicairkan.

## SARAN

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan penyusunan sampai dengan pengiriman RPD Harian antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu adanya penguatan koordinasi internal SATKER agar RPD Harian dapat disusun secara tepat waktu dan jumlah serta tidak mengalami keterlambatan;
- b. Perlu adanya sosialisasi penggunaan aplikasi penyusunan RPD Harian khususnya pada kebijakan penggabungan data antar-PPK SATKER;
- c. Kemudahan akses melalui *web based* seperti SAKTI pada SATKER mitra KPPN Jakarta V karena belum seluruhnya menggunakan SAKTI;
- d. Diadakan sanksi dari KPPN Jakarta V sebagai bentuk peringatan terhadap SATKER yang melalaikan RPD Harian baik dalam hal ketepatan jumlah maupun waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Abrurrahmah. (1993). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Afriansyah, E. A. (2016). Penggunaan software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 53-63.
- Bayu, C. (2020). Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden terhadap Preferensi Pemilih Pemula pada Pilpres 2019. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(1), 9-21.
- Winardi, S. E. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Prenada Media.
- Kementerian Keuangan. (2020). Laporan Pemerintah Tahun Anggaran 2020 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Muthohar, A. (2012). Faktor-Faktor Utama Yang Mempengaruhi Efektifitas Perencanaan Kas Pada Satuan Kerja-Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Jakarta II. Depok: Universitas Indonesia.
- Nova, Feni, M. (2005). Hubungan Minat Menonton Televisi dengan Motivasi Belajar Siswa, [Skripsi]. Pekanbaru.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- \_\_\_\_\_. 2014. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
- \_\_\_\_\_. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas.
- Potter, B. H., & Diamond, J. (1999). *Guidelines for public expenditure management. International Monetary Fund*.
- Prabowo, N. T. (2017). Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(2), 55-66.
- Rizaldi, M. I. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Efektivitas Perencanaan Kas Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 13-22.
- Sarwono, Sarlito. (2009). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shaleh, Abdul Rahman & Wahab, Muhibb Abdul. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shaleh, Abdul Rahman. (2009). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sigit, T. A. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi rencana penarikan dana (RPD) harian satuan kerja kementerian/lembaga. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 145-161.
- Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sumantri, J. (2017). Akselerasi Penyelesaian Dana Retur SP2D: Studi Kasus Pada Kantor Bayar KPPN Jakarta V. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 39-50.

- Sumantri, J. (2018). Analisis Faktor Kepatuhan Bank/Pos Persepsi terhadap Pelimpahan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 56-74.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian eksploratif, entepretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akurasi Perencanaan Kas Keluar (Rencana Penarikan Dana Harian) Tingkat Satuan Kerja. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 1(1).